AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i1.4437

IMPLEMENTASI TANTANGAN DAN UPAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Implementation, Challenges, and Efforts in Achieving Good Governance in Indonesia

Angye Mareta Y[1], Aldri Frinaldi[2], Roberia[3]
Universitas Negeri Padang
angyemareta3@gmail.com; alfrinaldi@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 22, 2024	Dec 6, 2024	Dec 18, 2024	Dec 23, 2024

Abstract

This study aims to analyze the concepts, challenges, and strategies in realizing *good governance* in Indonesia through a *literature review approach*. *Good governance* is a basic principle of governance that includes transparency, accountability, public participation, law enforcement, and service effectiveness. The research method used is *desk research*, with data sourced from journal articles, books, research reports, and relevant policy documents. This research prioritizes literature published in the last 10 years to ensure the freshness and relevance of the data. The results show that although Indonesia has adopted the principles of *good governance* in various policies, its implementation still faces a number of challenges, such as weak law enforcement, low public participation, and lack of accountability in some government sectors. To address these challenges, this study recommends several strategies, including strengthening institutional capacity, information technology-based transparency, and increasing collaboration between the government, society, and the private sector. The conclusion of this study is that the implementation of *good governance* in Indonesia requires a holistic approach involving various parties and consistent efforts to improve the quality of governance. This

Jurnal Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

research is expected to contribute to the development of public policies and better government practices in the future.

Keywords: Good Governance, Governance, Transparency, Accountability, Public Participation

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, tantangan, dan strategi dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia melalui pendekatan *literature review*. *Good governance* merupakan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, dan efektivitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah *desk research*, dengan data yang bersumber dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan. Penelitian ini mengutamakan literatur yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan kebaruan dan relevansi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* dalam berbagai kebijakan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi publik, dan kurangnya akuntabilitas di beberapa sektor pemerintahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi berbasis teknologi informasi, dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan *good governance* di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dan upaya konsisten untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik dan praktik pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: *Good Governance*, Tata Kelola Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan *good governance*. Sejak era reformasi 1998, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan struktural dalam tata kelola pemerintahan, seperti desentralisasi, penguatan demokrasi, dan penegakan hukum. Tujuan utama dari perubahan tersebut adalah menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Namun, meskipun banyak langkah positif yang telah diambil, implementasi prinsip *good governance* masih menghadapi banyak kendala.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mencakup elemen-elemen penting seperti partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, penerapan *good governance* menjadi agenda

penting untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, meskipun *good governance* telah menjadi bagian integral dari kebijakan nasional, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Korupsi, lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama. Selain itu, kompleksitas sistem pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari berbagai tingkatan dan keragaman budaya juga menambah tantangan dalam memastikan implementasi tata kelola yang efektif di seluruh wilayah.

Pentingnya *good governance* bagi pembangunan nasional menjadikannya isu yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah dapat mengelola sumber daya secara efisien, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dapat menghambat perkembangan negara, memperburuk ketimpangan sosial, dan merusak kepercayaan publik.

Salah satu tantangan besar dalam mewujudkan *good governance* adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK), korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi masalah yang serius di berbagai tingkat pemerintahan. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan good governance. Meskipun telah ada banyak reformasi di sektor pemerintahan, namun masalah korupsi, partisipasi yang rendah, serta ketidaktransparanan anggaran masih menjadi penghambat utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Suryadinata, 2010). Korupsi masih menjadi masalah utama dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2020, Indonesia menempati peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang menunjukkan perlunya upaya lebih keras dalam memberantas korupsi di semua tingkatan pemerintahan." (Transparency International, 2020)

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik juga mengurangi kualitas demokrasi dan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah dan

masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik dan kebijakan yang diambil (Suryadinata, 2010).

Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara dan kebijakan pemerintahan juga masih menjadi masalah. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran negara, sering kali terjadi pemborosan dan ketidaktransparanan yang merugikan kepentingan publik. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara sering kali menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidaktransparanan dalam kebijakan pemerintahan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Prasetyo, 2017). Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan, yang berdampak pada pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketimpangan ini semakin memperburuk tantangan dalam mewujudkan *good governance*, karena sebagian besar masyarakat merasa tidak memiliki akses yang setara terhadap peluang yang ada.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis tantangan dan strategi dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia melalui kajian literatur. Dengan memahami berbagai temuan dari penelitian sebelumnya, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang relevan untuk mendukung implementasi *good governance* secara efektif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik pemerintahan yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review yang bertujuan untuk menganalisis konsep, tantangan, dan strategi dalam mewujudkan **good governance* di Indonesia. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengevaluasi dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur sekunder yang membahas topik terkait. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali perspektif yang beragam dan membangun pemahaman menyeluruh tentang implementasi *good governance* di Indonesia.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif dengan memanfaatkan data sekunder. Data yang digunakan berasal dari literatur primer seperti artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian, serta literatur sekunder seperti dokumen kebijakan dan laporan

pemerintah. Penelitian juga memanfaatkan sumber digital dari basis data terkemuka seperti Google Scholar, Scopus, ProQuest, JSTOR, dan ResearchGate. Agar tetap relevan, hanya literatur yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, yang berfokus pada konteks Indonesia atau negara dengan karakteristik serupa, yang disertakan dalam analisis. Literatur yang digunakan juga harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi literatur menggunakan kata kunci yang relevan, seperti *good governance* di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan strategi peningkatan tata kelola pemerintahan. Setelah literatur diidentifikasi, dilakukan proses seleksi untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Seleksi ini melibatkan screening awal berdasarkan abstrak dan penilaian kualitas berdasarkan kredibilitas sumber. Literatur yang memenuhi kriteria kemudian dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analysis* yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, kategorisasi temuan, dan sintesis temuan. Reduksi data dilakukan dengan membaca, menyaring, dan merangkum isi literatur yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam kategori utama, seperti konsep dan prinsip *good governance*, tantangan implementasi, serta strategi peningkatan *good governance*. Sintesis temuan dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang mendukung pembahasan penelitian.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan beberapa langkah, seperti triangulasi sumber untuk memverifikasi data dari berbagai literatur, peninjauan ulang terhadap literatur yang digunakan, serta penerapan kriteria penilaian yang konsisten dalam proses seleksi data. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai *good governance* di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utamanya, serta memberikan rekomendasi strategi berbasis literatur yang dapat mendukung implementasi *good governance* secara lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* dalam berbagai kebijakan, seperti implementasi e-government, reformasi birokrasi, dan penguatan partisipasi publik melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik yang sering kali rentan terhadap korupsi. Selain itu, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah, mencerminkan perlunya peningkatan transparansi dan penegakan hukum (Mardiasmo, 2002).

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip yang menjadi landasan penting bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep *good governance* telah diterapkan dalam berbagai kebijakan dan program untuk memperbaiki kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Setelah era reformasi 1998, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan bersih. (World Bank, 2018)

Namun, meskipun sudah ada banyak upaya untuk mewujudkan good governance, kondisi implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai masalah, seperti korupsi, kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan sosial, masih mewarnai sistem tata kelola pemerintahan di tanah air. Dalam pembahasan ini, akan diulas lebih dalam mengenai kondisi *good governance* di Indonesia, yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, dan lainnya.

1. Transparansi

   Transparansi adalah prinsip utama dalam *good governance* yang mengharuskan pemerintah untuk terbuka dalam memberikan informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kinerja. Indonesia telah memulai langkah-langkah menuju transparansi dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, teknologi informasi dan e-government telah mulai digunakan untuk mempermudah akses data publik. Namun, implementasi transparansi di Indonesia masih menghadapi kendala. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap akses informasi, serta kurangnya kemauan dari sebagian aparatur

negara untuk terbuka tentang kebijakan dan pengelolaan anggaran. Selain itu, meskipun pemerintah pusat mulai terbuka, transparansi di tingkat daerah masih sering kali kurang memadai.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pemerintah terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil, serta penggunaan sumber daya publik. Di Indonesia, penguatan akuntabilitas dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti sistem pelaporan kinerja pemerintah dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, praktik akuntabilitas masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan internal dan politik yang sering mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Korupsi menjadi salah satu penghalang terbesar dalam mencapai akuntabilitas yang baik. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sejumlah pemberantasan korupsi, tetapi praktik korupsi tetap ada dan menyentuh berbagai sektor, baik di pusat maupun daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya, implementasi akuntabilitas belum maksimal.

3. Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah elemen penting dari *good governance* yang menuntut masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik. Indonesia telah mengupayakan partisipasi melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal. Banyak masyarakat yang merasa tidak terlibat dalam keputusan-keputusan penting dan tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kebijakan publik. Rendahnya partisipasi ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman politik masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap efektivitas kebijakan pemerintah.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih adalah kunci untuk menciptakan good governance. Di Indonesia, meskipun ada lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, penegakan hukum sering kali terhambat oleh praktik korupsi dan intervensi politik. Salah satu contoh adalah lemahnya

penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana sering terjadi pelanggaran yang tidak mendapat sanksi yang setimpal. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah lambatnya proses hukum dan ketidakpastian hukum yang mengarah pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Reformasi di sektor ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien.

5. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan sumber daya publik merupakan salah satu indikator dari *good governance* yang penting. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pemborosan anggaran, duplikasi program, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun Indonesia telah mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang disusun dan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

6. Keadilan dan Inklusivitas

Keadilan sosial dan inklusivitas menjadi prinsip penting dalam *good governance* untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, mendapatkan pelayanan dan akses yang setara terhadap berbagai sumber daya. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program pendidikan, ketimpangan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat besar. Penyebab utama ketidakadilan sosial ini adalah ketimpangan dalam distribusi pembangunan dan pelayanan publik yang tidak merata. Pemerintah perlu lebih fokus pada pemerataan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal, agar tercipta pemerintahan yang lebih inklusif.

Mewujudkan *good governance* di Indonesia adalah sebuah proses yang panjang dan membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Meskipun telah ada berbagai kemajuan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi, tantangan besar seperti korupsi, ketidakmerataan dalam pelayanan publik, dan ketidakadilan sosial masih menghalangi tercapainya tata kelola pemerintahan yang

baik. Oleh karena itu, untuk mencapai *good governance* yang lebih baik, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih konkret dan berkesinambungan. Pemerintah harus memperkuat prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta menjamin penegakan hukum yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Melalui langkah-langkah perbaikan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan, Indonesia dapat terus bergerak menuju tercapainya *good governance* yang lebih baik, yang tidak hanya meningkatkan kualitas pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Indonesia akan semakin mampu mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Adapun berbagai upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut:

1. Lemahnya Penegakan Hukum

   Penegakan hukum yang lemah di Indonesia menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan good governance. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sering terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum menyebabkan munculnya ketidaksetaraan di masyarakat. Adapun upaya mengatasi yang dilakukan yaitu:

   a. Penguatan Lembaga Penegak Hukum: Salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkuat lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki kapasitas yang cukup baik dalam hal personel, anggaran, dan infrastruktur untuk melaksanakan tugas penegakan hukum secara efektif dan tanpa intervensi politik.
   b. Reformasi Peradilan: Penyempurnaan sistem peradilan dengan memastikan independensi hakim dan jaksa sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang adil. Peningkatan kualitas pelatihan bagi aparat hukum juga perlu dilakukan agar mereka dapat memproses kasus dengan transparansi dan tanpa diskriminasi.
   c. Sanksi Tegas dan Konsisten: Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi, juga sangat

diperlukan. Pengawasan yang ketat terhadap proses hukum akan mengurangi praktik impunitas yang masih marak di beberapa sektor.

2. Rendahnya Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah salah satu pilar utama dalam good governance, karena dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik di Indonesia masih tergolong rendah, baik dalam bentuk konsultasi publik, pengawasan kebijakan, maupun keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan. Upaya mengatasi yaitu:

a. Penyuluhan dan Edukasi Publik: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pemerintahan melalui berbagai program penyuluhan dan edukasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak warga negara dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses pemerintahan yang transparan.

b. Meningkatkan Akses terhadap Informasi: Mengembangkan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. E-Government dapat menjadi solusi untuk mempercepat distribusi informasi dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang berjalan.

c. Membangun Forum Dialog: Pemerintah perlu menciptakan lebih banyak forum diskusi publik, baik yang bersifat formal maupun informal, di mana masyarakat bisa menyampaikan pendapat, kritik, atau saran terkait kebijakan publik. Selain itu, pembangunan kanal komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga akan memperkuat partisipasi publik.

3. Kurangnya Akuntabilitas di Beberapa Sektor Pemerintahan

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama dalam good governance, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas segala kebijakan dan tindakan yang diambil. Namun, di beberapa sektor pemerintahan di Indonesia, masih ditemukan lemahnya akuntabilitas, baik dalam pengelolaan anggaran negara, pelayanan publik, maupun dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Hal ini seringkali menyebabkan pemborosan

anggaran dan pengambilan keputusan yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Bentuk upaya mengatasi:

a. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan: Meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting. Penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bawaslu, dan Ombudsman akan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan. Proses evaluasi yang sistematis dan transparan akan memastikan efektivitas kebijakan yang diambil.
b. Reformasi Sistem Pengelolaan Anggaran: Dalam beberapa sektor, penyalahgunaan anggaran masih sering terjadi. Oleh karena itu, reformasi pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel harus dilaksanakan dengan baik. Sistem pelaporan anggaran yang berbasis teknologi (e-budgeting) dapat memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipantau oleh masyarakat dan lembaga pengawas secara real-time.
c. Peningkatan Integritas Aparat Pemerintah: Pembentukan budaya akuntabilitas di kalangan aparatur negara juga perlu diperkuat. Dengan meningkatkan integritas dan profesionalisme pejabat publik, maka penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan bisa diminimalkan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

4. Penerapan Teknologi dan Digitalisasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, penerapan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan sangat penting. Pemerintah harus terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Upaya mengatasi yaitu:

a. E-Government: Pengembangan e-government yang lebih luas, mulai dari layanan administrasi publik hingga transparansi anggaran, akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara langsung dan memantau jalannya pemerintahan. Hal ini dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
b. Digitalisasi Pengawasan: Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pelaporan online, sistem audit digital, dan penggunaan big data untuk mendeteksi potensi kebocoran anggaran atau penyimpangan lainnya, akan memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

KESIMPULAN

Good governance merupakan prinsip fundamental yang harus diwujudkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan berkeadilan. Di Indonesia, penerapan *good governance* menjadi tantangan besar mengingat kompleksitas sistem pemerintahan, tingkat korupsi yang masih tinggi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya partisipasi publik. Meskipun pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memperkuat tata kelola, implementasinya masih belum optimal di semua sektor.

Untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan langkah-langkah strategis yang holistik, termasuk peningkatan transparansi melalui teknologi informasi, seperti e-government, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui penyediaan akses informasi yang lebih baik dan peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan sinergi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama dan pelaksanaan yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan *good governance* yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperbaiki kualitas pelayanan, dan memperkuat pembangunan nasional. Kesuksesan ini akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa Oktavia, dkk. (2022). Analisis penerapan *Good governance* terhadap pelayanan publik di Kantor Kecamatan Baturaja Barat. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 5, Number 4, 2022 P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205 Open Access: https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue

Aplikasi Peduli Lindungi. Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 2, Desember 2023. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Astomo, Putra. 2014. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.64

Engkus, dkk. (2021). Mewujudkan *Good governance* Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial,Vol 19 No. 1 2021.

Fitria Andalus Handayani, dkk. (2019). Implementasi *Good governance* Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 11 No. 1 Juni 2019: 1 -11P-ISSN 2085-6555

Handayani, Andalus. Nur. Ichsana. 2019. Implementasi *Good governance* Di Indonesia.Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara. Vol 11 No.1 Hal. 1-11.

Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governancedi Indonesia. Journal E-Gov Wiyata: Education and GovernmentVolume 1 Nomor 1, Februari 2023(halaman 40-52)https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Khairudin, (2021). Potret Kepercayaan Publik, *Good governance* Dan E-Government Di Indonesia. Jawa Tengah: CV. Amerta Media

Mardiasmo, D. (2002). *Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyadi, M., & Romdana, R. (2018). Analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan perizinan. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 7(2), 14–19.

Neova Derenov1, Ratih Yanuar Rizky. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan *Good governance* Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. 15 No. 2 pp. 135-149 Website: https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD ISSN: 1829-5193, e-ISSN: 2615-3351 DOI: https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2

Prasetyo, Y. (2017). *Desentralisasi dan Implementasi Good Governance di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Sulfiani, Ni'mah. 2021. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Public. Volume XVII. Nomor 1 Hal 95- 116.

Surya Kurniadi. (2023). Perwujudan *Good governance* Pada Pelayanan Publik Melalui

Suryadinata, L. (2010). *Pemerintahan yang Baik dan Demokrasi: Tantangan Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Suryadinata, L. (2010). *Pemerintahan yang Baik dan Demokrasi: Tantangan Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Syalom M.C. Lenak, dkk. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik MelaluiPenerapan Electronic Government DiDinasPendidikanKotaTomohon. Jurnal Governance vol.1, No. 1, 2021ISSN: 2088-2815

Transparency International. (2020). *Indeks Persepsi Korupsi Global 2020*. Berlin: Transparency International.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

World Bank. (2018). *Indonesia's Governance and Development: Challenges and Opportunities*. Washington, D.C.: World Bank.